

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah dianalisis dapat disampaikan bahwa banyak aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program bedas sapujagat yang mana Ripley dan Franklin mengatakan bahwa, apabila semakin kompleks suatu kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah, maka akan semakin banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Banyaknya tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap aktor pelaksana kebijakan maka semakin banyak pula sumberdaya yang dibutuhkan. Peran setiap aktor pelaksana kebijakan di implementasi kebijakan program bedas sapujagat ini saling berhubungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Adanya analisis peran aktor melalui *power-interest* grid yang dikemukakan Bryson membuat peran aktor kebijakan semakin tertata dan terlihat jelas dimana dapat membantu analisis dalam penelitian ini. Peran setiap aktor kebijakan dikelompokkan menjadi peran aktor kebijakan official atau pemerintah dan aktor kebijakan non official atau kelompok kepentingan yang mana telah dikemukakan oleh James serta peran aktor juga di kelompokkan dengan 4 kategori yang sesuai dengan teori Bryson. 4 kategori pengelompokan tersebut dibagi menjadi sesuai dengan seberapa berperan aktor kebijakan dalam program bedas sapujagat. 4 kategorisasi menurut power interest grid ini adalah *subject*, *key players*, *crowd*, *context setter*. Dengan adanya peran setiap aktor dalam Bedas Sapujagat, maka dapat dikatakan program akan berjalan baik apabila semua aktor yang

terlibat melaksanakan perannya secara maksimal. Apabila salah satu dari peran aktor kurang berjalan dengan fungsinya, dapat dikatakan program bedas sapujagat kurang efektif pelaksanaannya.

Saran, bagi kegiatan program Bedas Sapujagat dari peneliti ialah tanggung jawab pelaksana kebijakan Bedas Sapujagat dapat memonitor seberapa efektifnya kegiatan sosialisasi di dalam lingkungan rumah dan memastikan apakah orangtua dari anak – anak target kebijakan telah mendapatkan *insight* yang sesuai dengan tujuan program bedas sapujagat. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, semua aktor kebijakan berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jika, salah satu dari tugas dan fungsi tersebut kurang dijalankan dan diterapkan dengan baik maka pelaksanaan program ini dapat dibilang kurang berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA

### REFERENSI BUKU

Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*.

Yogyakarta: Gaya Media.

Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung*

*Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Agustino, Leo: *Dasar-dasar kebijakan publik*, Bandung, 2016

Sugiyono: *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*

Silalahi, Ulber: *Metode Penelitian Sosial*

Bryson, Jhon M. 2004. *What Do When Stakeholders Matter: Stakeholders*

*Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubbert H.

Humphrey Institute Of Public Affairs

James E Anderson *public policy making 8th edition*

### PERATURAN-PERATURAN

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembaharuan Undang -

Undang Perkawinan tahun 1974

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2020

LKIP Kabupaten Bandung 2022

## REFERENSI INTERNET

Pernikahan Dini di Kabupaten Bandung Masih Tinggi

<https://portalbandungtimur.pikiran-rakyat.com/warta-bandung-timur/pr-942834274/pernikahan-dini-di-kabupaten-bandung-masih-tinggi>

Yosevita, Latupapua. 2015. Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Agroforestri. Volume 10 Nomor 1

Artikel UNHR: Child and Forced Marriage, Including in Humanitarian Settings, <https://www.ohchr.org/en/women/child-and-forced-marriage-including-humanitarian-settings#:~:text=Worldwide%2C%20more%20than%20650%20million,union%2C%20before%20reaching%20age%2018.>

Yayasan Sapa Institue website

<https://yayasansapa.id/child-marriage-remains-a-serious-problem-in-indonesia>

Ppid.bandung.kab.co.id diakses pada 2 juni 2022